



RENCANA KERJA(RENJA)

2019

DPMPTSP

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2017 dan Capaian Renstra DPMPTSP.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP	15
2.2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).....	18
2.2.2 Rata-rata waktu layanan izin sesuai waktu.....	19
2.2.3 Rata-rata Waktu Respon Pengaduan.....	22
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	28
BAB IV PENUTUP.....	32

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPd. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPd;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPd, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan

tahun $n+1$. Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra Perangkat Daerah, dan RPJMD, bagi RKA Perangkat Daerah, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung disusun dengan memperhatikan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
5. Permendagri No.186 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan JAngka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Walikota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Peraturan Walikota Bandung Nomor 533 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2015;
12. Peraturan Walikota Bandung No 1383 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
13. Peraturan Walikota Bandung No 121 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja DPMPTSP Kota Bandung Tahun 2019 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja DPMPTSP Kota Bandung Tahun 2019 adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh DPMPTSP Kota Bandung;
2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi rumusan program dan kegiatan

4.2 Rekapitulasi program dan kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2017 dan Capaian Renstra DPMPTSP

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2017 melaksanakan 2 urusan, 7 program, 23 Kegiatan dengan jumlah anggaran kegiatan Tahun 2017 sebesar Rp 13.587.221.378 dan jumlah realisasi anggaran kegiatan Tahun 2017 sebesar Rp 9.416.146.751. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja DPMPTSP dan pencapaian Renstra DPMPTSP sampai dengan tahun 2017 untuk urusan wajib dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 2.1-1

NO	SASARAN	PD / URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA SKPD PADA TAHUN 2018 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2017)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI (TAHUN 2017)	
				5	6		7	
1	2	3	4	K	RP	K	K	RP
1	Meningkatkan dan menjamin kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		100%	22,980,516,914	100%	85%	3,723,492,944
		Urusan Penanaman Modal		82		82		
		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		442,280,000		80%	35,062,500
		Penataan arsip SKPD	Tertatanya arsip DPMPTSP	5 tahun	442,280,000	1 tahun	80%	35,062,500

	Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Layanan Izin Sesuai Waktu Rata-rata Waktu Respon Pengaduan	82 100% 3 jam	17,994,400,000	82 100% 3 jam	92%	1,437,150,605
	Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Layanan Izin Sesuai Waktu Rata-rata Waktu Respon Pengaduan	82 100% 3 jam	17,994,400,000	82 100% 3 jam	92%	1,437,150,605
	Penyusunan/ penyempurnaan dan pemeliharaan sistem informasi	Aplikasi perizinan; dan Jaringan pelayanan perizinan terpadu	15 aplikasi	2,478,700,000	6 aplikasi	83%	1,067,410,755
	Fasilitasi pelayanan administrasi perijinan	Dokumen laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan	5 dokumen	11,000,650,000	-	-	-
	Sosialisasi/ Publikasi Pelayanan Perijinan	Kegiatan sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan	10 kali	1,253,200,000	-	-	-
	Penyelenggaraan pameran PPTSP	Kegiatan penyelenggaraan pameran perijinan terpadu satu pintu	10 kali	1,047,200,000	-	-	-
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu pintu	20 kali	762,000,000	-	-	-
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	4,756 Triliun	3,673,072,815	4,52 Triliun	93%	2,060,673,740
	Fasilitasi Daerah dalam rangka promosi penanaman modal	Fasilitasi promosi penanaman modal	2 kegiatan	506,697,425	1 kegiatan	100%	231.977.750

	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	4,756 Triliun	3,673,072,815	4,52 Triliun	93%	2,060,673,740
	Penyelenggaraan Promosi, Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya kegiatan pameran dan promosi PMDN untuk peningkatan investasi	6 kegiatan	3,022,030,640	3 kegiatan	80%	1,684,351,240
	Fasilitasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (PPP)	Business Meeting; dan Investment Plan Book	1 dokumen	144,344,750	1 dokumen	100%	144,344,750
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	4,756 Triliun	870,764,099	4,52 Triliun	77%	190,606,099
	Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	Aplikasi penanaman modal	1 Aplikasi	507,312,999	1 Aplikasi	30%	9,904,999
	Pengawasan dan Investasi Penanaman Modal	Laporan pengawasan penanaman modal	1 dokumen	97,443,000	1 dokumen	100%	97,443,000
	Pengendalian Penanaman Modal	Laporan kegiatan pengendalian penanaman modal	2 dokumen	266,008,100	1 dokumen	100%	83,258,100
Rata-rata capaian kinerja (%)						74%	3,723,492,944

Penjelasan dari tabel 2.1-1 adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi, Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal dalam target tahun terakhir Renstra DPMPTSP periode 2013-2018 adalah 6 kegiatan, sementara dalam kenyataan dalam realisasinya di tahun 2017 anggaran hanya terserap 80%
- b. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal hanya tercapai 30% secara kinerja karena pada kegiatan tersebut DPMPTSP sudah melakukan koordinasi dengan BKPM terkait proses integrasi SPIPISE namun terkendala terkait persiapan secara teknis belum memadai
- c. Berikut kegiatan yang sudah mencapai target 100% adalah kegiatan fasilitasi kerjasama pemerintah dengan badan usaha (PPP), Pengawasan dan Investasi Penanaman Modal dan Pengendalian Penanaman Modal

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja dan Renstra DPMPTSP tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal dan vertikal, peningkatan kapasitas SDM yang terus dilakukan sehingga dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan keuangan secara terpadu untuk peningkatan keberhasilan capaian kinerja. Namun di sisi lain juga terdapat faktor penghambat, yaitu adanya kurangnya SDM dalam membantu pelaksana teknis kegiatan, terkendalanya penyusunan perubahan anggaran di SIRA terkait komponen, penetapan APBDP di bulan Desember 2017 mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Pelaksanaan program kegiatan yang sudah dilaksanakan harus berkorelasi dengan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja. Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcome).

Untuk mengukur tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat lebih lengkap dalam tabel berikut ini :

TABEL 1.1-2 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2018 (TAHUN BERJALAN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan(ouput)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018	
					Target Renja SKPD (tahun 2017)	Realisasi Renja SKPD (tahun 2017)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
1	Urusan Wajib									
1.16	Penanaman Modal									
1.16.1.16.01.19	Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Waktu Layanan Izin Sesuai Waktu Persentase Penurunan Pengaduan Rata-Rata Waktu Layanan Izin respon pengaduan Nilai standar	82 N/A N/A 7 Hari Kerja 3 Jam N/A N/A	82,89 66.48% 21,86% 5,8 Hari 2,9 Jam 1000 76,95%	82 N/A N/A 7 Hari Kerja 3 Jam N/A N/A	79,38 N/A 21,86% 10 Hari Kerja 4,2 Jam N/A N/A	96,80% N/A 109,30% 46,14% 60% N/A N/A	82 N/A N/A 7 Hari Kerja 3 jam N/A N/A	82 NA NA 7 Hari Kerja 3 jam N/A N/A	100% N/A NA 100% 100% N/A N/A

		kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI Persentase layanan ijin sesuai waktu								
1.16.1.16.01.19.01	Penyusunan/penyempurnaan rancangan produk hukum	Dokumen rancangan produk hukum daerah yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu	1 dokumen	2 dokumen	5 dokumen	3 dokumen	60%	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.16.1.16.01.19.02	Penyusunan/penyempurnaan dan pemeliharaan sistem informasi	Aplikasi sistem informasi pelayanan perizinan terpadu yang terpelihara dan dikembangkan	3 aplikasi 2 jaringan	10 aplikasi	6 aplikasi 2 jaringan	5 aplikasi 2 jaringan	83% 100%	3 aplikasi 2 jaringan	3 aplikasi 2 jaringan	100% 100%
1.16.1.16.01.19.03	Fasilitasi pelayanan administrasi perijinan	Dokumen laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan	N/A	2 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.16.1.16.01.19.05	Penyelenggaraan pameran perijinan terpadu satu pintu	Terselenggaranya pameran PPTSP	N/A	4 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.16.1.16.01.19.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A






		penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu pintu								
		Dokumen laporan hasil penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu pintu	N/A	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.12.2.12.01.01.19.008	Advokasi dan Pelayanan Pengaduan perijinan	Presentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	80%	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	80%	100%
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)								
2.12.2.12.01.01.15.07	Fasilitasi daerah dalam rangka promosi penanaman modal	Fasilitasi Promosi Penanaman Modal	1 kegiatan	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
2.12.2.12.01.01.15.18	Penyelenggaraan promosi, pameran dan penyediaan sarana promosi penanaman modal	Terselenggaranya Kegiatan Pameran dan Promosi PMDN untuk Peningkatan Investasi	3 kegiatan	N/A	3 kegiatan	5 kegiatan	167%	3 kegiatan	3 kegiatan	100%
	Fasilitasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (PPP)	Terfasilitasinya Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (PPP)	N/A	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%	N/A	N/A	100%

	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)								
	Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	Tersedianya Sistem Pelayanan Informasi dan Pelayanan Pendaftaran Investasi secara Elektronik (SPIPISE) yang dikembangkan	1 dokumen	N/A	1 aplikasi	-	0%	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.12.2.12.01.01.16.22	Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi Penanam Modal	Digital Data Sebaran Investasi	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.12.2.12.01.01.20.02	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Laporan kegiatan pengendalian penanaman modal	1 dokumen	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.12.2.12.01.01.16.021	Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan	Rasionalisasi proses perizinan dan non perizinan	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.12.2.12.01.01.16.03	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal	Dokumen Master Plan Penanaman Modal	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Nilai evaluasi AKIP	N/A	74,22	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.16.1.16.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	NA	NA
		Persentase penurunan temuan BPK/Inspektorat	N/A	20%	NA	NA	NA	N/A	N/A	N/A
		Persentase tertib administrasi barang/asset daerah	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.16.1.16.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan akuntabilitas kinerja	N/A	2 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.16.1.16.01.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran	Laporan keuangan semester I	N/A	2 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.16.1.16.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan keuangan akhir tahun	N/A	2 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP

Susunan Organisasi DPMPTSP terbentuk di awal tahun 2017. Perubahan dari BPPT menjadi DPMPTSP tentunya mengalami banyak transisi dalam perubahan tugas dan pokok fungsi. Salah satunya dalam pengelolaan jenis izin dibagi menjadi 2 jenis yaitu jenis penanaman modal (izin prinsip) dan jenis izin - non izin lainnya mencakup 54 jenis izin seperti tabel berikut dibawah ini :

54 JENIS IZIN	7 IZIN BERETRIBUSI	2 IZIN (BERKONTRIBUSI PAJAK DAERAH)
<p>LAYANAN IZIN</p> <ul style="list-style-type: none">  Izin Prinsip  Izin Mendirikan Bangunan (IMB) → Retribusi Izin Menara Telekomunikasi (IMTEL) Izin Lokasi (ILOK) Izin Lingkungan (ILING)  Izin Gangguan (IG) → Retribusi Izin Usaha Industri (IU) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Izin Usaha Perdagangan (IUP) Tanda Daftar Gudang (TDG) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tanda Daftar Usaha Kecil (TDUK) Tanda Data Usaha Mikro (TDUM) Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP) Izin Perluasan Usaha Industri (IPU) Bagi Industri Kecil Dan Menengah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Yang Lokasinya Di Daerah Kabupaten/Kota Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP 2T) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota 	<p>LAYANAN IZIN</p> <ul style="list-style-type: none">  Izin Usaha Toko Modern (IUTM)  Izin Khusus Waktu Pelayanan (Bagi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB) Golongan A, B dan C Untuk Pengecer Dan Penjual Langsung Minum Ditempat Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Izin Pendidikan Dasar Izin Operasional Pendidikan Nonformal Izin Rumah Potong Hewan Izin Praktek Dokter Hewan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) → Retribusi Izin Pematangan Lahan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sungai Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) 	<p>LAYANAN IZIN</p> <ul style="list-style-type: none">  Izin Usaha Toko Modern (IUTM)  Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek → Retribusi Izin Usaha Angkutan Izin Pengelolaan Tempat Parkir → Pajak Izin Penyelenggaraan Angkutan Karyawan → Retribusi Izin Penyelenggaraan Angkutan Sekolah → Retribusi Izin Penyelenggaraan Taksi → Retribusi Kartu Pengawasan Angkutan Karawan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Kartu Pengawasan Angkutan Sekolah Kartu Pengawasan Angkutan Taksi Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) Angkutan Barang Umum Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) Angkutan Umum Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen → Pajak Izin Operasional Bengkel Tertunjuk Izin Operasional Bengkel Umum Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan Dan Perbaikan Kapal Izin Bongkar Muat Izin Usaha Perkeretaapian Umum Skala Kota

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2017, pelaksanaan program kegiatan yang sudah dilaksanakan harus berkorelasi dengan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja. Berikut adalah tabel yang menggambarkan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja DPMPTSP dalam 1 tahun. Berikut korelasi antara tujuan, sasaran, indikator kinerja dan realisasi DPMPTSP Tahun 2017

TABEL 2.2-1 TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA, TARGET DAN REALISASI

DPMPTSP TAHUN 2017

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Meningkatkan kualitas dan kinerja DPMPTSP dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,00	79,38
		Rata-rata waktu layanan izin	7 hari kerja	10 hari kerja
		Rata-rata waktu respon pengaduan	3 jam	4 jam
Meningkatkan kualitas dan kinerja DPMPTSP dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi	Nilai investasi berskala nasional	4.523 triliun rupiah	12,70 triliun rupiah

Indikator kinerja dalam kurun waktu tahun 2013-2018 ada perubahan sesuai dengan tujuan dan sasaran ditunjang dengan kondisi dan trend saat itu. Kinerja pelayanan yang menunjukkan tingkat capaian kinerja DPMPTSP periode 2013-2018 berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian Kinerja		Proyeksi Capaian Kinerja	
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks kepuasan masyarakat	-	-	80	82	82	82	79.27	79.38	82	82

2	Persentase layanan izin sesuai waktu	-	-	100%	N/A	N/A	N/A	69.59%	N/A	N/A	N/A
3	Persentase penurunan pengaduan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	21.86%	N/A	N/A	N/A
4	Rata-rata waktu respon pengaduan	-	-	3 jam	3 jam	N/A	N/A	N/A	4 jam	3 jam	3 jam
5	Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI	-	-	940	N/A	N/A	N/A	895	N/A	N/A	N/A
6	rata-rata waktu penyelesaian izin	-	-	6 hari kerja	7 hari kerja	7 hari kerja	7 hari kerja	6.02 hari kerja	10 hari kerja	7 hari kerja	7 hari kerja
7	Nilai evaluasi AKIP	-	-	73	N/A	N/A	N/A	72.51	N/A	N/A	N/A
8	Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
9	Persentase penurunan temuan BPK/ Inspektorat	-	-	20%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Persentase tertib administrasi barang/asset daerah	-	-	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tahun 2017 indikator IKM realisasinya mencapai 79,38 atau kategori "Baik. Survei kepuasan masyarakat ini dilakukan secara online dengan program aplikasi "GAMPIL" (Gadged Application Mobile for Licences) melalui alamat website resmi DPMPSTSP Kota Bandung yaitu www.dpmptsp.bandung.go.id".

2.2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (CSI) dapat didefinisikan nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan di Pelayanan Publik Pemerintah Kota Bandung. Berikut ini adalah hasil SKM selama tahun 2017 di DPMPTSP

Tabel 2.3
Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017

Bulan	Jumlah Pemohon	Nilai IKM	Index
Januari	1965	83.64	3.34
February	108	79.83	3.19
Maret	654	80.04	3.20
April	813	78.5	3.14
Mei	1710	77.47	3.10
Juni	1670	74.82	2.99
Juli	2247	75.16	3.01
Agustus	3005	75.97	3.04
September	2424	78.01	3.12
Oktober	2779	78.08	3.12
November	2347	77.33	3.09
Desember	1804	77.47	3.10
	Rata-rata Nilai IKM	79,38	Baik

Dari tabel 2.3 terlihat bahwa kepuasan masyarakat terhadap layanan perijinan DPMPSTSP Kota Bandung adalah "Baik". Kepuasan masyarakat tertinggi adalah dalam hal kenyamanan lingkungan di mana lingkungan Kantor DPMPTSP berada dalam kondisi yang bersih dan asri sehingga tercipta kenyamanan lingkungan. Kepuasan masyarakat urutan selanjutnya adalah dalam hal kenyamanan pelayanan dan kepastian biaya pelayanan karena segala persyaratan permohonan ijin dikomunikasikan kepada pemohon, dan biaya yang dikenakan terhadap pelayanan izin yang berbayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam SOP pelayanan

perizinan DPMPTSP selain itu petugas pelayanan melayani pemohon dengan ramah dan sopan.

2.2.2 Rata-rata waktu layanan izin sesuai waktu

1. Persentase Layanan Izin Sesuai Waktu

Persentase layanan ijin sesuai waktu dihitung dengan cara membandingkan jumlah ijin yang sesuai waktu dengan jumlah jenis ijin keseluruhan.

Persentase layanan ijin sesuai waktu

$$= \frac{\text{Jumlah ijin sesuai waktu}}{\text{Seluruh ijin yang terbit}} \times 100 \%$$

Acuan waktu yang digunakan berdasar pada Peraturan Walikota Nomor 495 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu

Satu Pintu. Berikut rincian waktu pelayanan perizinan DPMPTSP Kota Bandung Tahun 2017:

Tabel 2.4
Rincian waktu pelayanan perizinan DPMPTSP Kota Bandung
Tahun 2017

No	Nama Izin	Waktu
1	Izin Bongkar Muat	11 hari, 5 jam, 3 menit, 0 detik.
2	Izin Gangguan	5 hari, 18 jam, 54 menit, 28 detik.
3	Izin Khusus Waktu Pelayanan (Bagi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern)	4 hari, 5 jam, 4 menit, 11 detik.
4	Izin Lingkungan	4 hari, 20 jam, 12 menit, 53 detik.
5	Izin Lingkungan (Untuk Pemohon Instansi Pemerintah)	6 hari, 9 jam, 19 menit, 16 detik.
6	Izin Lokasi	6 hari, 4 jam, 23 menit, 39 detik.
7	Izin Mendirikan Bangunan untuk NON Rumah Tinggal < 4 lantai	6 hari, 5 jam, 30 menit, 2 detik.

8	Izin Mendirikan Bangunan untuk NON Rumah Tinggal > 4 lantai / > 5000 m2 dan SPBU	11 hari, 16 jam, 44 menit, 12 detik.
9	Izin Mendirikan Bangunan untuk Rumah Tinggal 1 s/d 2 lantai	8 hari, 13 jam, 38 menit, 36 detik.
10	Izin Mendirikan Bangunan untuk Rumah Tinggal 3 lantai	5 hari, 4 jam, 14 menit, 4 detik.
11	Izin Mendirikan Bangunan untuk Tempat Ibadah	8 hari, 12 jam, 40 menit, 29 detik.
12	Izin Mendirikan Bangunan Untuk Tower	6 hari, 15 jam, 40 menit, 25 detik.
13	Izin Operasional Bengkel Tertunjuk	
14	Izin Operasional Bengkel Umum	
15	Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan	6 hari, 17 jam, 19 menit, 11 detik.
16	Izin Pematangan Lahan/Tanah	5 hari, 18 jam, 0 menit, 3 detik.
17	Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum Skala Kota	
18	Izin pembuangan air limbah ke sungai	6 hari, 16 jam, 32 menit, 34 detik.
19	Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Skala Kota	
20	Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini	2 hari, 15 jam, 48 menit, 59 detik.
21	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar	2 hari, 17 jam, 44 menit, 21 detik.
22	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal	3 hari, 17 jam, 10 menit, 52 detik.
23	Izin Pengelolaan Tempat Parkir	13 hari, 12 jam, 20 menit, 58 detik.

24	Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)	
25	Izin Penyelenggaraan Angkutan Karyawan	
26	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek	14 hari, 15 jam, 45 menit, 57 detik.
27	Izin Penyelenggaraan Angkutan Sekolah	
28	Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi	18 hari, 5 jam, 6 menit, 3 detik.
29	Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen	25 hari, 1 jam, 21 menit, 58 detik.
30	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)	7 hari, 16 jam, 57 menit, 51 detik.
31	Izin Perluasan Kawasan Industri	
32	Izin Perluasan Usaha Industri Bagi Industri Kecil dan Menengah	
33	Izin Praktik Dokter Hewan	4 hari, 3 jam, 25 menit, 54 detik.
34	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	2 hari, 14 jam, 25 menit, 59 detik.
35	Izin Usaha Angkutan	18 hari, 14 jam, 24 menit, 45 detik.
36	Izin Usaha Industri	10 hari, 4 jam, 19 menit, 28 detik.
37	Izin Usaha Jasa Konstruksi	6 hari, 10 jam, 16 menit, 42 detik.
38	Izin Usaha Kawasan Industri Skala Kota	
39	Izin Usaha Pemotongan Hewan	
40	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional	
41	Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Skala Kota	
42	Izin Usaha Perdagangan	6 hari, 3 jam, 52 menit, 48 detik.
43	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan	9 hari, 21 jam, 36 menit, 9 detik.
44	Izin Usaha Simpan Pinjam	10 hari, 4 jam, 48 menit, 3 detik.
45	Izin Usaha Toko Modern	12 hari, 21 jam, 45 menit, 52 detik.
46	Kartu Pengawasan Angkutan Karyawan	3 hari, 10 jam, 59 menit, 15 detik.

47	Kartu Pengawasan Angkutan Kota	6 hari, 4 jam, 42 menit, 20 detik.
48	Kartu Pengawasan Angkutan Sekolah	1 hari, 23 jam, 30 menit, 24 detik.
49	Kartu Pengawasan Angkutan Taksi	7 hari, 23 jam, 35 menit, 49 detik.
50	Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Umum	5 hari, 14 jam, 41 menit, 51 detik.
51	Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum	8 hari, 23 jam, 50 menit, 53 detik.
52	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	3 hari, 13 jam, 22 menit, 20 detik.
53	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba	9 hari, 7 jam, 18 menit, 57 detik.
54	Tanda Daftar Gudang	6 hari, 13 jam, 28 menit, 33 detik.
55	Tanda Daftar Perusahaan	5 hari, 17 jam, 45 menit, 1 detik.
56	Tanda Daftar Usaha Kecil	30 hari, 11 jam, 2 menit, 47 detik.
57	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	3 hari, 4 jam, 19 menit, 21 detik.
58	Tanda Data Usaha Mikro	32 hari, 3 jam, 43 menit, 9 detik
Total		8 hari, 20 jam, 54 menit, 27 detik.

Waktu layanan untuk *herregistrasi* dalam Perwal Nomor 495 ditentukan selama 4 hari kerja untuk semua jenis izin yang memerlukan *herregistrasi*.

Pada tahun 2016, realisasi persentase layanan izin sesuai waktu sebesar 76,95% dari target tahun 2016 sebesar 100%. Realisasi kinerja sebesar 76,95% tersebut diperoleh dari hasil pengukuran kinerja sebagai berikut:

2.2.3 Rata-rata Waktu Respon Pengaduan

Indikator Rata-rata Waktu Respon Pengaduan dihitung dengan cara membandingkan Jumlah waktu penyelesaian pengaduan dengan Jumlah pengaduan.

$$\text{Penurunan Pengaduan} = \frac{\text{Pengaduan tahun ini} - \text{Pengaduan tahun sebelumnya}}{\text{Pengaduan tahun sebelumnya}} \times 100 \%$$

Realisasi rata-rata waktu respon pengaduan mencapai 2,94 jam didapat dari gambaran sebagai berikut:

Tabel 2.6
Rata-rata Waktu Respon Pengaduan Tahun 2017

Bulan	Jumlah Pengaduan	Rata-Rata Waktu Respon
Januari	72	5.78
Februari	106	17.55
Maret	138	4.64
April	111	8.98
Mei	155	10.44
Juni	83	6.36
Juli	103	7.04
Agustus	129	4.54
September	115	4.79
Oktober	114	3.78
November	97	3.74
Desember	184	3.98
Total	1407	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh DPMPTSP. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran DPMPTSP. Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran DPMPTSP :

PERMASALAHAN LINGKUNGAN INTERNAL

- 1) Belum seluruh produk izin mampu bersaing baik dari sisi kecepatan waktu, kemudahan prosedur dan biaya;
- 2) Mekanisme koordinasi lintas sektor antara DPMPTSP dengan dinas teknis lain belum cukup terkoordinasi, terintegrasi, sederhana dan tersinkronisasi baik dalam hal pelayanan perizinan maupun pemenuhan aspek pendukung;

-
- 3) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di internal DPMPTSP untuk pelayanan perizinan dan aspek pendukungnya belum optimal;
 - 4) Kebijakan, strategi dan perencanaan untuk menata pasar dinilai cenderung masih lemah;
 - 5) Masih ada prosedur izin yang perlu diatur lebih teknis baik dalam hal izin (misal: IMB) maupun proses (pencabutan, penangguhan, dsb);
 - 6) Jumlah SDM yang sesuai dengan kompetensi masih kurang;
 - 7) Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan perlu ditingkatkan agar lebih memadai;
 - 8) Keterbatasan anggaran, dan implementasi anggaran berbasis kinerja yang belum optimal.
 - 9) Belum tercerminnya Komitmen dan *Political Will* Pimpinan dalam Program dan Kegiatan di DPMPTSP;
 - 10) SOP Perizinan perlu penyempurnaan agar selaras dengan Visi dan Misi Kota Bandung.

POTENSI LINGKUNGAN INTERNAL

- 1) Kepemimpinan dan kebijakan yang sudah mendorong inisiatif pemanfaatan TIK dalam pelayanan perizinan;
- 2) Berdasarkan survey yang pernah dilakukan, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan di DPMPTSP cukup tinggi;
- 3) DPMPTSP menjadi koordinator dan gerbang utama untuk hampir seluruh administrasi pelayanan perizinan;
- 4) DPMPTSP sudah memiliki inisiatif untuk memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam fitur pelayanan perizinannya;
- 5) Adanya Komitmen dan *Political Will* Pimpinan dalam penyelenggaraan perizinan yang inovatif, kreatif dan kolaboratif;
- 6) Adanya Visi dan Misi yang jelas dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023;
- 7) Tersedianya jumlah SDM;

-
- 8) Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pelayanan perijinan.

PERMASALAHAN LINGKUNGAN INTERNAL

1. Kompetensi dan kualitas SDM masih terbatas;
2. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;
3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja;
4. Belum berlakunya secara efektif sistem *reward* dan *punishment*;
5. Belum berlakunya insentif berbasis kinerja, setiap orang masih diklasifikasikan secara merata sehingga penghasilan pun relatif sama;
6. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dinamika perubahan regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terutama di tingkat pusat berlangsung sangat cepat namun belum dibarengi dengan penyesuaian yang cepat oleh daerah. Hal ini salah satunya disebabkan oleh belum terdapatnya struktur khusus di DPMPTSP Kota Bandung yang memiliki fungsi regulasi sehingga menjadi cenderung lambat dan kurang adaptif terhadap dinamika regulasi secara umum;
7. Dibutuhkan mekanisme perihal hubungan kerja dan koordinasi dengan SKPD teknis terkait pemberian izin khususnya fungsi kendali/kontrol atas waktu pelayanan, mengingat SLA (*Service Level Agreement*) DPMPTSP salah satunya adalah aspek waktu. Saat ini waktu proses menjadi lebih lama karena DPMPTSP tidak punya kendali atas waktu ketika proses izin sudah masuk ke SKPD lain;
8. Cakupan layanan perizinan belum lengkap (penolakan, pembatalan, dan pembekuan izin) dan beberapa diantaranya belum memiliki SOP (pemberian salinan perizinan dan legalisasi). Kemudian, perlu diperjelas batasan izin yang perlu rekomendasi teknis dan yang tidak perlu;

Selain kondisi internal juga terdapat kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran DPMPTSP :

POTENSI LINGKUNGAN EKSTERNAL

- 1) Review terhadap kelembagaan secara terus menerus menyesuaikan dengan dinamika dan aturan hukum yang berkembang;
- 2) Iklim investasi Kota Bandung yang sangat mendukung pertumbuhan pasar/pelanggan;
- 3) Adanya unit kerja lain yang memiliki kompetensi dalam mendukung fungsi DPMPTSP dalam pelayanan perizinan;
- 4) Tersedianya standar-standar yang dapat dijadikan acuan dalam hal peningkatan pelayanan perizinan yang berlaku secara internasional;
- 5) Adanya transisi kepemimpinan, dan Walikota memiliki kewenangan utama dalam pelimpahan izin pada unit kerja;
- 6) Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi

PERMASALAHAN LINGKUNGAN EKSTERNAL

1. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tumpang tindih dan sering berubah;
2. Perubahan lingkungan strategis;
3. Lemahnya koordinasi;
4. Tidak adanya kejelasan waktu penyelesaian di dinas terkait;
5. Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah.

Berdasarkan gambaran tentang potensi dan permasalahan lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan kedepan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

-
3. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
 4. Perbaikan sistem pengendalian internal di lingkungan DPMPTSP Kota Bandung. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian.
 5. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi teknis terkait baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.
 6. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset Badan.
 7. Kelembagaan/Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kota Bandung, Standar Operasonal Prosedur, Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana kerja perlu di evaluasi.

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasarkan hasil telaahan pada Renstra K/L Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 2015-2019, khususnya pada Matrik program dan kegiatan dapat dilihat beberapa program/kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan perizinan di Kota Bandung, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis BKPM, Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal, yang ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan penerbitan surat persetujuan penanaman modal;
 - b. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal;
 - c. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitas penanaman modal.
- 2) Dalam upaya mencapai tujuan diatas, BKPM juga menetapkan indikator kinerja dari tujuan-tujuan tersebut sebagai ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan yang dilakukan melalui penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Indikator-indikator yang berkaitan dengan pelayanan perizinan diuraikan sebagai berikut :
 - a. Perbaikan kemudahan memulai berusaha;
 - b. Penyederhanaan bisnis proses perizinan investasi;
 - c. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal;
 - d. Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan (Izin);
 - e. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas kualitas pelayanan.

TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi.

Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

Pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung berdasarkan rumusan misi RPJMD beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,17	80,19	80,21	80,23	80,25
			Rata-rata Waktu Layanan Izin	7 hari kerja	7 hari kerja	7 hari kerja	7 hari kerja	7 hari kerja
			Rata-rata Waktu Respon Pengaduan	3 jam	3 jam	3 jam	3 jam	3 jam
2	Terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif	Meningkatnya realisasi investasi	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	5.23 T	5.65 T	6.1 T	6.59 T	7.12 T
			Jumlah Investor (PMDN/PMA)	500	550	600	650	700
3	Terwujudnya penurunan pelanggaran perizinan secara administratif	Menurunnya pelanggaran perizinan secara administratif	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,17	80,19	80,21	80,23	80,25
			Kepatuhan investor terhadap aturan perizinan	32	100	150	200	200

3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Perumusan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 disusun dengan memperhatikan target capaian kinerja sasaran dalam rencana strategis DPMPSTSP Kota Bandung Tahun 2018-2023 sesuai dengan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023. Pada tahun 2019DPMPSTSP Kota Bandung telah merumuskan 8 (delapan) program dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan yang terdiri dari 3 (tiga) program urusan wajib dengan 9 (sembilan) kegiatan dan 5 (lima) program non urusan dengan 20 (dua puluh) kegiatan. Total keseluruhan kebutuhan dana sesuai dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp. 8.8 (Delapan Puluh Delapan Juta Milyar Rupiah)) dengan sumber dana dari APBD Kota Bandung.

Tabel rencana program dan kegiatan disajikan sebagaimana tabel berikut:

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Jumlah Anggaran SIRA Yang Sudah Dinput SIRA	Persentase Input SIRA	Sumber dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(6)	(8)	(9)	(7)	(9)	(10)		
2	12	01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	3.486.503.572	3.486.503.572	100%	APBD	100%	7.964.350.000
2	12	01	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan penyediaan ATK	765.768.592	765.768.592	100%	APBD	12 laporan	1.572.000.000
2	12	01	15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan jenis bahan bacaan	19.500.000	19.500.000	100%	APBD	12 laporan	52.440.000
2	12	01	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan	519.382.500	519.382.500	100%	APBD	12 laporan	1.257.600.000
2	12	01	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa bulanan komunikasi, air dan listrik	332.907.280	332.907.280	100%	APBD	12 laporan	1.044.000.000
2	12	01	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa kebersihan kantor	49.456.000	49.456.000	100%	APBD	12 laporan	156.000.000
2	12	01	23 Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi	Jumlah laporan penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan pengemudi kantor	364.379.400	364.379.400	100%	APBD	12 laporan	874.510.000
2	12	01	20 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pengamanan kantor	468.487.800	468.487.800	100%	APBD	12 laporan	475.000.000
2	12	01	09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah laporan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	412.500.000	412.500.000	100%	APBD	12 laporan	650.400.000
2	12	01	17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman bulanan	187.608.000	187.608.000	100%	APBD	12 laporan	542.400.000
2	12	01	18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	217.428.000	217.428.000	100%	APBD	12 laporan	1.080.000.000
2	12	01	19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	132.000.000	132.000.000	100%	APBD	12 laporan	240.000.000
2	12	01	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	17.086.000	17.086.000	100%	APBD	12 laporan	20.000.000
2	12	01	22 Penyediaan Jasa media cetak dan teknologi informasi	Jumlah laporan penyediaan jasa media cetak dan teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
2	12	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		251.364.000	251.364.000	100%	APBD		300.000.000
2	12	05	04 Pembinaan Kinerja Aparatur		251.364.000	251.364.000	100%			300.000.000
2	12	02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase layanan sarana dan prasarana aparatur	888.015.000	888.015.000	100%	APBD	80%	2.300.000.000
2	12	02	05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	-	2 unit	800.000.000
2	12	02	12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah unit Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	-	-	-	-	45 unit	1.500.000.000
2	12	02	22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	181.000.000	181.000.000	100%	APBD	2 unit	572.400.000
2	12	02	24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan yang dikelola	707.015.000	707.015.000	100%	APBD	57	1.000.000.000
2	12	03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase tingkat kedisiplinan ASN	319.826.129	319.826.129	100%	APBD	80%	400.000.000
2	12	03	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah jenis pakaian dinas	319.826.129	319.826.129	100%	APBD	2 Jenis	400.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)						
			Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Jumlah Anggaran SIRA Yang Sudah Diinput SIRA	Persentase Input SIRA			
2	12	15		Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor PMDN/PMA	1000 investor	1.200.674.000	1.155.671.820	96%
2	12	15	17	Penyelenggaraan Promosi, Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal	1. Jumlah Sosialisasi Penanaman Modal 2. Jumlah Event Investasi Kota Bandung 3. Jumlah Pameran investasi	4 kali sosialisasi 4 kali event Investasi 3 Kali pameran	1.200.674.000	1.155.671.820	96%
2	12	16		Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai investasi PMDN/PMA	5,231,600,000 Triliun	530.783.000	247.605.000	47%
2	12	16	15	Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	Database Penanaman Modal	1 Database	300.783.000	37.500.000	12%
2	12	16	24	Kajian Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	Dokumen RUPM	1 Dokumen	230.000.000	210.105.000	91%
2	12	20		Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Investasi	Tingkat Pengawasan dan Pengendalian dalam Berinvestasi	30%	354.810.000	231.150.000	65%
2	12	20	03	Peningkatan Kepatuhan Penanaman Modal	Jumlah investor yang diawasi	12	156.560.000	104.900.000	67%
2	12	20	04	Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal	Jumlah investor yang dipantau dan dibina	20	198.250.000	126.250.000	64%
2	12	21		Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	1.437.150.000	1.404.225.000	98%
2	12	21	01	Pengelolaan Sistem Informasi Penanaman modal dan Pelayanan perijinan	Jumlah Aplikasi	3 Aplikasi	1.287.250.000	1.287.250.000	100%
2	12	21	02	Penyusunan/Penyempurnaan Rancangan Produk Hukum	Jumlah dokumen rancangan produk hukum	2 dokumen	149.900.000	116.975.000	78%

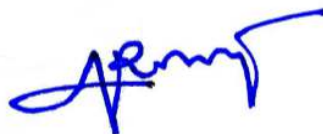
BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2019 merupakan suatu dokumen yang akan dijadikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung pada tahun 2019.

Akhirnya semoga Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dapat mencapai target kinerja yang diinginkan dan semoga Renja ini dapat dijadikan acuan kerja khususnya bagi seluruh aparat Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan umumnya bagi pihak-pihak yang terkait dalam menunjang tercapainya visi Kota Bandung **"TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA DAN AGAMIS"**

Bandung, Desember 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**



Drs. ARIEF SYAIFUDIN, S.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690111 199603 1 002